

FAKTOR-FAKTOR PENENTU INKLUSI KEUANGAN DI INDONESIA

PERIODE TAHUN 2012-2016

Yuni Noor Annisa¹

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

yuninoorannisa@gmail.com

Sugeng Setyadi²,

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

sugeng.setyadi@untirta.ac.id

Samsul Arifin³,

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

samsularifin@untirta.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of inflation, gross domestic product (GDP) per capita, Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) and Non Performing Loans (NPL) on financial inclusion in Indonesia, with indicators of 33 provinces during the period of 2012-2016. The method used in processing data is the panel data. The results showed that the inflation variable have effect on financial inclusion, GDP per capita have effect on financial inclusion and the NPL have effect on financial inclusion in Indonesia for the period of 2012-2016. However, MSMEs have no effect on financial inclusion in Indonesia for the period of 2012-2016

Keywords: Inflation; GDP Percapita; MSMEs; NPL

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh inflasi, Gross Domestic product (GDP) perkapita, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Non Performing Loan (NPL) terhadap inklusi keuangan di Indonesia, dengan indikator 33 provinsi selama periode 2012-2016. Metode yang digunakan dalam pengolahan data yaitu panel. Hasil penelitian menunjukkan variabel inflasi berpengaruh terhadap inklusi keuangan, GDP perkapita berpengaruh terhadap inklusi keuangan dan NPL berpengaruh terhadap inklusi keuangan di Indonesia periode tahun 2012-2016. Namun, UMKM tidak berpengaruh terhadap inklusi keuangan di Indonesia periode 2012-2016

Kata Kunci : Inflasi, GDP Perkapita, UMKM, NPL

1. Pendahuluan

Di Indonesia, tahun 2012 merupakan tahun tantangan bagi sektor riil dalam negeri, Pasar domestik yang kuat bisa menjadi relokasi pasar domestik sementara waktu. Pasar domestik Indonesia juga menjadi incaran pasar impor terutama dari negara-negara Asia akibat mitra dagang mereka di UE melemah. Akses ke perbankan yang tidak cukup mudah disertai bunga kredit yang mahal, biaya logistik yang tinggi karena terbatasnya konektivitas dan tentu saja infrastruktur yang tidak memadai dan masalah akut korupsi.

Tahun 2014, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami pelambatan, hal tersebut dikarenakan pemulihan pasca krisis tahun 1999 yang belum maksimal, sehingga ekspor cenderung menurun karena minimnya permintaan, namun ditahun 2015 sektor impor menjadi sorotan akibat kebijakan tata niaga impor yang menyebabkan terjadinya masalah dalam impor dan berdampak pada nilai pertumbuhan ekonomi di tahun 2015.

Perbaikan untuk menanggulangi permasalahan yang terjadi dari awal tahun 2012 dapat dilihat dari nilai rasio NPL yang menurun, sehingga kepercayaan bank terhadap masyarakat/nasabah meningkat, dan pada tahun 2016, muncul 30 hingga 40 start-up yang mulai dibangun, hal tersebut sejalan pula dengan komitmen negara-negara anggota G-20 untuk memasukan literasi dan inklusi keuangan menjadi kebijakan.

Dalam hal menciptakan perekonomian yang stabil pemerintah membuat berbagai macam kebijakan yang tentunya diharapkan dapat membawa angin segar terhadap perekonomian di negaranya. Di Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan keuangan inklusif. Kebijakan keuangan inklusif adalah suatu bentuk pendalaman layanan keuangan (financial service deepening) yang ditujukan kepada masyarakat in the bottom of the pyramid untuk memanfaatkan produk dan jasa keuangan formal seperti sarana menyimpan uang yang aman (keeping), transfer, menabung maupun pinjaman dan asuransi. Hal ini dilakukan tidak saja menyediakan produk dengan cara yang sesuai tapi dikombinasikan dengan berbagai aspek (Bank Indonesia 2016).

Menurut Bank Indonesia (2014) Istilah financial inclusion atau keuangan inklusif menjadi tren pasca krisis 2008 terutama didasari dampak krisis kepada kelompok in the bottom of the pyramid (pendapatan rendah dan tidak teratur, tinggal di daerah terpencil, orang cacat, buruh yang tidak mempunyai dokumen identitas legal, dan masyarakat pinggiran) yang umumnya unbanked yang tercatat sangat tinggi di luar negara maju.

Berdasarkan studi yang telah dilakukan oleh Ummah (2013) dikatakan bahwa negara-negara di Asia maka Jepang dan Korea Selatan merupakan negara dengan nilai indeks inklusif tertinggi dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia. Jepang memiliki nilai indeks inklusif sebesar 0,9 dan Korea Selatan memiliki nilai indeks inklusif sebesar 0,5. Ini artinya bahwa hanya dua negara tersebut yang relatif merata dalam hal akses dan pelayanan keuangan yang telah baik.

Pertumbuhan inklusif di Asia terus didorong dikarenakan terus meningkatnya ketimpangan pendapatan secara rata-rata dari tahun ke tahun. Pertumbuhan inklusif atau pertumbuhan yang menyeluruh merupakan salah satu tujuan penting dari berbagai kebijakan ekonomi di dunia khususnya di benua Asia. Pemerintah, mitra pembangunan dan ekonom telah memberikan perhatian kepada pertumbuhan yang menyeluruh di bidang ekonomi dan sosial khususnya dalam akses pendidikan, perawatan kesehatan, jaminan sosial, air bersih dan sanitasi, transportasi dan listrik serta jasa-jasa keuangan untuk semua segmen masyarakat (Morgan, 2014).

Guna meningkatkan inklusi keuangan di negara-negara Asia, dibentuk beberapa program unggulan untuk meminimalisir hambatan-hambatan serta meningkatkan akses masyarakat ke jasa-jasa keuangan. Sebagai contoh Indonesia memiliki strategi khusus untuk meningkatkan inklusi keuangan antara lain melalui pengadaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), program tabunganKu, E-Money, Telkomsel Cash, Program "Ke Bank", dan peningkatan pelayanan microfinance. Contoh lain yaitu Thailand yang memiliki dua institusi khusus guna mencapai peningkatan inklusi keuangan yaitu village fund dan Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives (BACC) serta India yang menerapkan berbagai program seperti Agent Banking, Mobile Phone Banking dan inovasi unik seperti Biometrically Scanned yang merupakan suatu sistem identitas bagi penduduk India sehingga mempermudah pemberian jasa-jasa keuangan secara menyeluruh (Mankiw, 2008).

Berbagai studi tentang literasi keuangan telah dilakukan di beberapa negara. Wachira dan Kihiu (2012) telah melakukan studi tentang pengaruh literasi keuangan terhadap akses jasa layanan keuangan di Kenya pada tahun 2009, ternyata akses terhadap jasa keuangan tidak hanya dipengaruhi oleh tingkat literasi keuangan tetapi lebih besar dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, jarak dari bank, usia, status perkawinan, jenis kelamin, ukuran rumah tangga, dan tingkat pendidikan. Mbutor dan Uba (2013) mengungkapkan bahwa selain meningkatkan efektivitas kebijakan moneter, inklusi keuangan juga berperan dalam membantu beberapa tujuan kebijakan bank sentral. Pertama, inklusi keuangan dapat

membantu bank sentral dalam menerbitkan mata uang yang sah dengan meningkatkan penggunaan e-payments dan biaya percetakan atau penertiban mata uang. Kedua, inklusi keuangan membantu menjaga cadangan eksternal untuk kestabilan nilai tukar dengan peningkatan akses keuangan bagi UKM akan memacu produktifitasnya yang lebih besar sehingga dapat meningkatkan ekspor dan stabilitas pasokan dalam negeri. Ketiga, inklusi keuangan dapat meningkatkan a sound financial system dengan memacu pengembangan stabilitas sistem keuangan yang didanai melalui tabungan non-volatile yang tahan terhadap guncangan eksternal. Selain itu, inklusi keuangan juga dapat membantu bank sentral dalam memberikan saran kebijakan yang tepat kepada pemerintah karena tingginya partisipasi masyarakat dalam sektor keuangan formal sehingga meningkatkan visibilitas dalam kondisi perekonomian (Mbutor dan Uba, 2013).

Selain itu, inklusi keuangan dapat meningkatkan integrasi sistem keuangan domestik yang memiliki pengaruh yang sangat penting terhadap transmisi kebijakan moneter (Filardo et al., 2014). Di Indonesia efektivitas kebijakan moneter dilihat melalui inflasi yang terjadi sesuai dengan target inflasi yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Hal ini karena sejak tahun 2005 Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter dengan inflasi sebagai sasaran utama kebijakan moneter (Inflation Targeting Framework), sehingga sebagai kebijakan moneter yang ditetapkan Bank Indonesia diarahkan untuk menjaga inflasi agar sesuai dengan target inflasi tersebut. Ketika Bank Indonesia memprediksi laju infasi maksimum atau batas minimum dari target inflasi, maka Bank Indonesia akan menerapkan berbagai kebijakan agar laju inflasi dapat kembali ke rentan target inflasi yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Sarma dan Pais (2008) meneliti mengenai hubungan antara inklusi keuangan dan pembangunan. Dengan menggunakan indeks inklusi keuangan, studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang signifikan mempengaruhi inklusi keuangan. Tingkat pembangunan manusia dan inklusi keuangan memiliki korelasi yang besar. Sementara faktor sosial ekonomi seperti pendapatan memiliki hubungan positif dengan inklusi keuangan. Begitu halnya dengan ketidakmerataan, literasi dan urbanisasi. Infrastruktur fisik memiliki hubungan yang signifikan dengan inklusi keuangan. Sementara untuk variabel perbankan NPA dan CAR memiliki hubungan negatif dengan inklusi keuangan.

Selain itu menurut Sarma (2012) inklusi keuangan merupakan sebuah proses yang menjamin kemudahan dalam akses, ketersediaan, dan manfaat dari sistem keuangan formal bagi seluruh pelaku ekonomi. Sehingga dapat diimpulkan bahwa inklusi keuangan

merupakan upaya meningkatkan akses masyarakat khususnya masyarakat unbankable dalam layanan jasa keuangan formal dengan mengurangi berbagai macam hambatan untuk mengaksesnya.

Keuangan inklusif mampu menjawab alasan tersebut dengan memberikan banyak manfaat yang dapat dinikmati oleh masyarakat, regulator, pemerintah dan pihak swasta, antara lain meningkatkan efisiensi ekonomi, mendukung stabilitas sistem keuangan, mengurangi shadow banking atau irresponsible finance mendukung pendalaman pasar keuangan memberikan potensi pasar baru bagi perbankan mendukung peningkatan Human Development Index (HDI) Indonesia, berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional yang sustain dan berkelanjutan, mengurangi kesenjangan (inequality), sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya berujung pada penurunan tingkat kemiskinan.

Berdasarkan hasil policy paper yang dikeluarkan Alliance Financial Inclusion (AFI) pada tahun 2010, para pengambil kebijakan mengakui kebutuhan untuk mengembangkan pendekatan yang berdasarkan data-data terdahulu untuk mengidentifikasi penggerak yang mempercepat integrasi sistem keuangan formal di negara tersebut. Dengan demikian para pengambil kebijakan dapat fokus, memiliki alur pemikiran yang tepat, dan dapat mengevaluasi kebijakan yang diambil guna memperluas akses keuangan (Beck dan Kunt, 2008).

2. Tinjauan Pustaka

Index of Financial Inclusion (IFI)

Indeks inklusi keuangan merupakan ukuran untuk tingkat inklusi keuangan. Indeks inklusi keuangan ini akan digunakan untuk mengukur tingkat inklusi keuangan di 33 provinsi di Indonesia dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016. Perhitungan indeks inklusi keuangan dalam penelitian ini mengikuti konsep perhitungan yang telah dilakukan oleh Sarma (2012). Indeks inklusi keuangan ini mencakup tiga dimensi yaitu dimensi penetrasi perbankan, ketersediaan jasa perbankan, dan penggunaan jasa perbankan. Indeks inklusi keuangan dapat dihitung jika masing-masing dimensi telah dihitung nilai indeks dimensi. Indeks dari setiap dimensi, d_i , dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut:

$$d_i = w_i \frac{A_i - m_i}{M_i - m_i} \quad ; i = 1,2,3 \quad (1)$$

Dimana: w_i = bobot untuk dimensi i , $0 \leq w_i \leq 1$ A_i = nilai terkini dari peubah i m_i = nilai minimum (batas bawah) dari peubah i M_i = nilai maksimum (batas atas) dari peubah i . Semakin tinggi nilai indeks suatu dimensi, semakin tinggi pula pencapaian di dalam dimensi tersebut. Misalkan, semakin tinggi indeks dimensi ketersediaan suatu provinsi, semakin tinggi pula jumlah bank yang dapat dijangkau masyarakat di provinsi tersebut. Untuk menghitung indeks setiap dimensi memerlukan bobot. Bobot ditentukan berdasarkan seberapa besar dimensi tersebut dapat mempengaruhi inklusi keuangan. Dalam penelitian ini, seluruh dimensi diasumsikan memiliki peranan yang sama penting dalam menentukan tingkat inklusi keuangan, sehingga masing-masing dimensi memiliki bobot sebesar 1. Selain menentukan bobot, untuk menghitung indeks setiap dimensi inklusi keuangan memerlukan batas atas dan batas bawah dari setiap indikator. Batas atas maupun batas bawah harus dijadikan nilai tetap. Batas bawah atau nilai minimum (m_i) setiap dimensi dalam penelitian ini adalah 0. Sedangkan untuk menentukan batas atas atau nilai maksimum (M_i) setiap indikator, ditentukan oleh sebaran masing-masing indikator. Sebagaimana penjelasan sebelumnya, dimensi inklusi keuangan yang akan diukur terdiri dari tiga dimensi.

Dimensi yang pertama adalah penetrasi perbankan yang menggambarkan banyaknya pengguna jasa perbankan. Indikator yang menggambarkan dimensi ini adalah jumlah rekening deposit. Dalam penelitian ini, indikator yang digunakan untuk dimensi penetrasi perbankan adalah jumlah rekening deposit di bank umum konvensional di setiap provinsi di Indonesia dibagi dengan jumlah populasi dewasa di provinsi tersebut.

Dimensi kedua dari inklusi keuangan adalah ketersediaan jasa perbankan yang menggambarkan jangkauan perbankan kepada masyarakat. Indikator yang menggambarkan dimensi ini dapat berupa outlet dari perbankan misalkan jumlah kantor cabang atau ATM yang tersebar di suatu wilayah. Dalam penelitian ini, indikator yang digunakan untuk dimensi ketersediaan jasa perbankan adalah jumlah kantor cabang bank umum konvensional di setiap provinsi dibandingkan dengan jumlah populasi dewasa di provinsi tersebut. Dimensi ketiga dari inklusi keuangan adalah kegunaan jasa perbankan yang menggambarkan manfaat jasa perbankan yang dirasakan oleh masyarakat. Indikator yang digunakan untuk menggambarkan dimensi ini dapat berupa jumlah tabungan, kredit, remitansi, asuransi, dan jasa lainnya yang ditawarkan oleh perbankan. Namun, untuk mempermudah dalam perhitungan, indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK), proksi dari jumlah tabungan, dan kredit yang disalurkan bank umum konvensional di

setiap provinsi dibagi dengan PDRB provinsi tersebut. Untuk perhitungan indikator dimensi ketiga setiap provinsi pada tahun t , yaitu kegunaan menggunakan rumus:

$$\text{kegunaan} = \frac{\text{tabungan+kredit}}{\text{PDRB}} \quad (2)$$

Oleh karena itu, nilai indeks inklusi keuangan akan berada antara 0 dan 1. Semakin tinggi nilai indeks, sistem keuangan semakin inklusif. Jika jarak antara titik O dengan titik X dilambangkan dengan X_1 , yaitu:

$$X_1 = \frac{\sqrt{d_1^2 + d_2^2 + d_3^2}}{\sqrt{w_1^2 + w_2^2 + w_3^2}} \quad (3)$$

$$X_2 = 1 - \frac{\sqrt{(w_1 - d_1)^2 + (w_2 - d_2)^2 + (w_3 - d_3)^2}}{\sqrt{w_1^2 + w_2^2 + w_3^2}} \quad (4)$$

IFI dibawah ini merupakan rata-rata sederhana dari X_1 dan X_2

$$IFI = \frac{1}{2} [X_1 + X_2] \quad (5)$$

Setelah masing-masing indeks dari ketiga dimensi inklusi keuangan setiap provinsi dihitung, indeks inklusi keuangan setiap provinsi dapat dihitung. Dengan bobot masing-masing dimensi sebesar 1, batas bawah setiap dimensi 0, dan batas atas setiap indikator yang telah ditentukan dari sebaran masing-masing indikator, Indeks dari inklusi keuangan dari provinsi K dapat dihitung dengan:

$$IFI = \frac{1}{2} \left[\frac{\sqrt{d_1^2 + d_2^2 + d_3^2}}{\sqrt{3}} + \left(1 - \frac{\sqrt{(w_1 - d_1)^2 + (w_2 - d_2)^2 + (w_3 - d_3)^2}}{\sqrt{3}} \right) \right] \quad (6)$$

Financial inclusion atau keuangan inklusif menjadi tren paska krisis 2008 terutama didasari dampak krisis kepada kelompok in the bottom of the pyramid (pendapatan rendah dan tidak teratur, tinggal di daerah terpencil, orang cacat, buruh yang tidak mempunyai dokumen identitas legal, dan masyarakat pinggiran) yang umumnya unbanked yang tercatat sangat tinggi di luar negara maju

Semua negara berupaya untuk meningkatkan perekonomiannya dengan berbagai macam kebijakan, dan inklusi keuangan merupakan salah satu kebijakan yang saat ini mulai bergerak ke arah yang signifikan, hal tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor,

baik dari segi kebijakan moneter maupun dari segi kehidupan ekonomi di masyarakat. Bila dari segi kebijakan moneter, beberapa ahli menyatakan bahwa inklusi keuangan berpengaruh pada inflasi serta berperan dalam membantu mencapai tujuan bank sentral (Mbutor dan Uba, 2013).

Di masyarakat, inklusi keuangan mempunyai peranan dalam aspek perekonomian, karena tujuan dari inklusi keuangan mempunyai sasaran kepada penduduk dengan pendapatan rendah atau pada posisi the bottom of pyramid, sehingga berbagai upaya yang dilakukan oleh bank sentral dalam meningkatkan inklusi keuangan dengan berbagai program, seperti KUR (Kredit Usaha Rakyat), Telkomsel T-Cash, E-Money, dan lain-lain. Sehingga keterbukaan masyarakat terhadap akses keuangan khususnya akses perbankan meningkat karena beberapa program dan kebijakan pemerintah yang menggunakan inklusi keuangan sebagai landasan dari beberapa program tersebut. Di masyarakat, sedang berkembang UMKM yang menyasar masyarakat ekonomi menengah dan hasil kesepakatan KTT G20 menetapkan inklusi keuangan untuk rumah tangga dan pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) sebagai pilar penting dalam pembangunan ekonomi, pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan di negara-negara anggotanya

Dalam penelitian ini terdapat beberapa hipotesis yang akan diuji dengan metode deskriptif dan ekonometri. Hipotesis pertama, terdapat peningkatan pertumbuhan Inklusif di Indonesia, dimana pertumbuhan inklusi dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Hal ini diperkirakan sebagai hasil kebijakan-kebijakan pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia serta variabel ekonomi yang mendukung seperti GDP Per Kapita penduduk Indonesia dan Inflasi yang tergolong rendah.

Hipotesis kedua bahwa terdapat pengaruh antara inklusi keuangan dengan pertumbuhan UMKM di Indonesia, hal ini berawal dari pemahaman bahwa inklusi keuangan mempunyai target kepada kalangan menengah kebawah dan rata-rata penggerak sektor UMKM merupakan kalangan masyarakat menengah kebawah. Hipotesis ketiga yaitu, dengan menurunnya tingkat NPL menyebabkan tingkat kepercayaan perbankan terhadap masyarakat meningkat, yang mempermudah akses masyarakat terhadap layanan perbankan.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi inklusi keuangan di Indonesia pada periode 2014 sampai dengan 2016, dengan menggunakan data dari 33 Provinsi di Indonesia. Sebagai variabel dependen penulis menggunakan Inklusi Keuangan dan variabel independen yaitu Gross Domestic Product (GDP) Per Kapita, Inflasi, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Non Performing Loan (NPL).

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah jenis data panel, yaitu gabungan antara data time series (tahun 2014 hingga tahun 2016) dan data cross section untuk 33 Provinsi di Indonesia. Dalam penelitian ini, data bersumber dari Bank Indonesia, Badan Pusat Statisti (BPS) dan Otoritas Jasa Keuangan. Serta Publikasi Ilmiah dari Bank Indonesia berupa jurnal. Serta, penulis menggunakan treatment pada data dengan cara melakukan transformasi data GDP Perkapita, dan NPL, agar data antar variabel terdistribusi normal. Dengan model penelitian sebagai berikut:

$$Finc_{it} = \beta_0 + \beta_1 INF_{it} + \beta_2 GDP_{it} + \beta_3 UMKM_{it} + \beta_4 NPL_{it} + \varepsilon_{it} \quad (7)$$

Keterangan:

Finc = Inklusi keuangan (persen)

INF = Inflation / inflasi (persen)

GDP = Gross Domestic Product (juta rupiah)

UMKM = Usaha Mikro Kecil Menengah (persen)

NPL = Non Performing Loan (persen)

β_0 = Intersep

$\beta_1 \beta_2 \beta_3$ = Koefisien Regresi

ε_{it} = Error diwaktu t untuk unit cross section i

i = Jumlah cross section terdiri dari 33 Provinsi di Indonesia

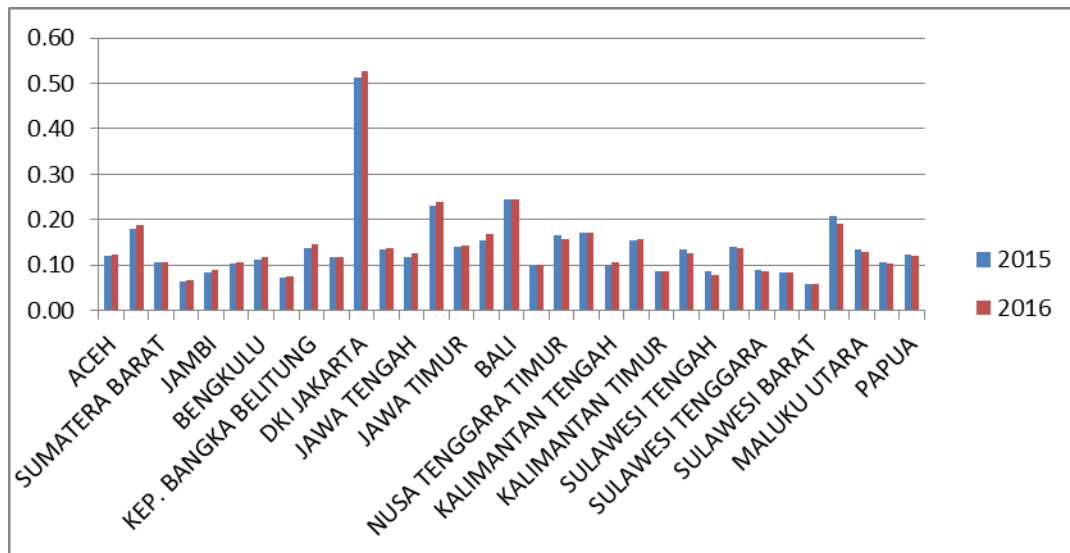
t = menunjukkan periode waktu yaitu dari tahun 2014-2016

4. Hasil dan Pembahasan

Inklusi Keuangan dihitung menggunakan Indeks Inklusi Keuangan yang terdiri dari 3 dimensi yaitu, penetrasi perbankan, ketersediaan jasa perbankan dan kegunaan jasa

perbankan. Perhitungan Indeks Inklusi Keuangan (IIK) atau Indeks Financial Inclusion (IFI) merujuk pada teori perhitungan yang dikemukakan oleh Madira Sarma.

Inklusi keuangan pada tahun 2012 sampai tahun 2016 mengalami kenaikan yang fluktuatif di masing-masing provinsi di Indonesia. Perkembangan Inklusi Keuangan di 33 Provinsi di Indonesia adalah sebagai berikut:



Sumber : Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2016

Gambar 1. Ideks Inklusi Keuangan 33 Provinsi di Indonesia tahun 2015 sampai tahun 2016

Indeks Inklusi Keuangan pada 33 Provinsi di Indonesia menggambarkan peningkatan di setiap tahunnya. Provinsi yang paling signifikan terhadap peningkatan Indeks Inklusi Keuangan yaitu provinsi DKI Jakarta dengan Indeks Inklusi pada tahun 2012 sebesar 0,50 % menjadi 0,53% pada tahun 2016. Hal tersebut menggambarkan peningkatan dalam penggunaan jasa layanan perbankan di DKI Jakarta.

Secara rata-rata pertumbuhan Inklusi Keuangan di Indonesia sebesar 0,16 % pada tahun 2012, ditahun 2014 sebesar 0,13 % serta di tahun 2016 sebesar 0,13 %. Hal tersebut menggambarkan secara keseluruhan Indeks Inklusi Keuangan mengalami penurunan. Namun, jika digambarkan secara parsial di masing-masing provinsi, indeks inklusi keuangan mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Pada penelitian ini pendekatan yang digunakan yaitu dengan menggunakan Fixed Effect Model (FEM), yang telah diuji dengan menggunakan uji chow, dan uji hausman sebagai pengujian terakhir.

Tabel 1. Hasil Chow Test

Effect Test	Statistic	d.f	Prob
Cross-Section F	45.048714	(32,128)	0,0000
Cross-Section Chi-Square	413.575735	32	0,0000

Berdasarkan hasil uji chow test diatas, dapat ditentukan bahwa model sementara yaitu menggunakan model Fixed Effect Model (FEM) hal tersebut dikarenakan hasil dari Probabilitas Cross-section chi-square < alpha (0,05) sehingga model yang digunakan yaitu FEM. Kemudian digunakan pengujian kembali, guna menentukan model terbaik yang dapat digunakan dalam pengolahan data, pengujian selanjutnya yaitu Hausman Test atau uji Hausman, dimana hasil estimasi sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-sq Statistic	Chi-Sq. d.f	Prob
Cross-Section random	20.722265	4	0,0004

Yang perlu diperhatikan dalam uji hausman adalah nilai probabilitas Cross-Section Random, dimana jika nilai Prob cross-section random < alpha (0,05) maka model yang digunakan yaitu FEM, dan jika probabilitas Cross-Section Random, dimana jika nilai Prob cross-section random > alpha (0,05) maka model yang digunakan adalah REM.

Berdasarkan hasil uji hausman yang dilakukan, nilai probabilitas cross-section random yaitu 0,0004 < 0,05, maka model terbaik yang digunakan yaitu Fixed Effect Model (FEM).

Berdasarkan hasil regres terhadap Inklusi keuangan dan variabel yang mempengaruhinya yaitu Inflasi, GDP Perkapita, UMKM, dan NPL, dan pengujian yang telah dilakukan, sehingga model yang terbaik digunakan yaitu Fixed Effect Model (FEM), maka hasil regres sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Regres Fixed Effect Model (FEM)

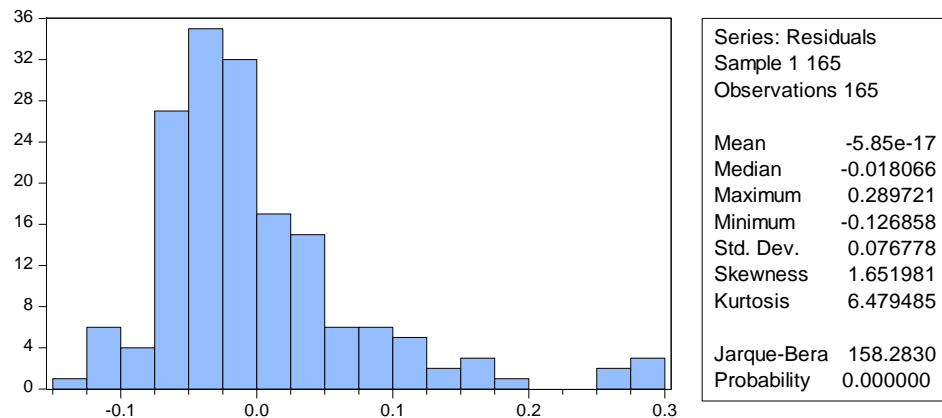
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.942936	0.148873	6.333811	0.0000
INFLASI?	-0.000595	0.000294	-2.025713	0.0449

LGDPK?	-0.170212	0.035275	-4.825257	0.0000
UMKM?	-0.000362	0.000344	-1.051623	0.2950
LNNPL?	-0.005184	0.002314	-2.240097	0.0268

Berdasarkan hasil regresi di atas, maka dalam bentuk model persamaan adalah sebagai berikut:

$$Finc_{it} = 0,0942936 - 0,000595INF_{it} - 0,170212LGDP_{it} - 0,000362UMKM_{it} - 0,005184lnNPL_{it} + \varepsilon_{it} \quad (8)$$

Uji Normalitas



Gambar 2. Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan hasil estimasi output diatas, dapat diketahui bahwa nilai JB sebesar 158,283 < nilai Chi-square tabel 194,8825 sehingga dapat diartikan bahwa data terdistribusi normal atau lolos uji normalitas (tolak H_0 , terima H_1).

Uji Asumsi Klasik

Tabel 4. Hasil uji Multikolinearitas

	INKLUSI	INFLASI	LGDPK	UMKM	LNNPL
INKLUSI	1.000000	0.117324	0.232607	0.121946	0.333463
INFLASI	0.117324	1.000000	0.064423	0.128762	0.028035
LGDPK	0.232607	0.064423	1.000000	-0.042388	0.505493
UMKM	0.121946	0.128762	-0.042388	1.000000	0.103782

LNNPL	0.333463	0.028035	0.505493	0.103782	1.000000
-------	----------	----------	----------	----------	----------

Berdasarkan hasil estimasi output diatas, dapat dilihat bahwa pada correlation matrix koefisien yang dihasilkan $< 0,8$. Sehingga, tidak terjadi multikolinearitas (terima H_0 , tolak H_1).

Tabel 5. Hasil Uji Heterokedastisitas

F-statistic	46.42615	Prob. F(14,150)	0.0000
Obs*R-squared	134.0612	Prob. Chi-Square(14)	0.0000
Scaled explained SS	345.3702	Prob. Chi-Square(14)	0.0000

Berdasarkan hasil estimasi output diatas, data yang diuji terkena heterokedastisitas, yaitu probabilitas Chi-Squared $< \alpha 0,05$ atau $0,0000 < 0,05$.

Menurut Baltagi (2005) untuk mengetahui apakah model terbebas dari masalah heterokedastisitas adalah dengan men-treatment model tersebut dengan menggunakan metode estimasi pembobotan (weighted) yaitu dengan cara dapat dilihat dari sum square error (SSE) sebelum dan sesudah diberi perlakuan cross sectional weights. Peneliti ini menggunakan metode estimasi pembobotan GLS yaitu Croos Section Weight. Adapun uji hipotesis yang digunakan yaitu:

H_0 : tidak terjadi heterokedastisitas

H_1 : terjadi heterokedastisitas

Untuk mendeteksi terjadinya Heterokedastisitas dalam model, digunakan beberapa indikator pada output eviews adalah sebagai berikut:

- Pada Sum Square Resid Weighted Statistic $<$ sum square resid unweighted statistic, maka tidak terjadi heterokedastisitas (terima H_0 , tolak H_1).
- Pada Sum Square Resid Weighted Statistic $>$ sum square resid unweighted statistic, maka tidak terjadi heterokedastisitas (tolak H_0 , terima H_1).

Tabel 6. Hasil Root Test

Weighted Statistics

R-squared	0.977491	Mean dependent var	0.315455
Adjusted R-squared	0.971161	S.D. dependent var	0.210764
S.E. of regression	0.023975	Sum squared resid	0.073577
F-statistic	154.4090	Durbin-Watson stat	1.892363
Prob(F-statistic)	0.000000		
Unweighted Statistics			
R-squared	0.928912	Mean dependent var	0.145320
Sum squared resid	0.079400	Durbin-Watson stat	1.537865

Dari hasil uji estimasi pada tabel 4.6, dapat dilihat bahwa nilai Sum Square Resid Weighted Statistic < sum square resid unweighted statistic, atau $0,073577 < 0,079400$, maka tidak terjadi heterokedastisitas (terima H_0 , tolak H_1).

Tabel 7. Hasil uji autokorelasi

F-statistic	71.15033	Prob. F(2,158)	0.0000
Obs*R-squared	78.18700	Prob. Chi-Square(2)	0.0000

Dari hasil estimasi output diatas, maka data terkena autokorelasi, sehingga penulis menggunakan uji Durbin Watson (D-W test) untuk menguji autokorelasi. Dengan uji hipotesis:

H_0 : tidak terjadi autokorelasi

H_1 : terjadi autokorelasi

Untuk mendeteksi terjadinya autokorelasi dengan menggunakan uji Durbin Watson, terdapat ketentuan sebagai berikut:

Tabel 8. Ketentuan Uji Durbin Watson

Nilai Durbin Watson	Hasil
$0 < d < d_L$	Menolak hipotesis nol; ada autokorelasi positif
$d_L < d < d_u$	Daerah keragu-raguan; tidak ada keputusan
$d_u < d < 4-d_u$	Gagal menolak hipotesis nol; tidak ada autokorelasi positif/negatif

$4-d_u < d < 4-d_L$	Daerah keragu-raguan; tidak ada keputusan
$4-d_L < d < 4$	Menolak hipotesis nol; ada autokorelasi negative

Sumber: Agus Widarjono, 2013

Autokorelasi positif	Daerah keragu-raguan	Tidak ada autokorelasi	Daerah keragu-raguan	Autokorelasi negatif
0	d_L	d_U	$4-d_U$	$4-d_L$
0	1,683	1,808	2,192	2,317

$$D_w = 1,916$$

Menggunakan rujukan Agus Widarjono yang menyatakan bahwa data terbebas dari autokorelasi jika nilai $d_u < \text{nilai } d_w < 4 - d_u$.

$$\text{Dimana} = 1,808 < 1,916 < 4 - 2,192$$

$$1,808 < 1,916 < 2,192$$

*Tabel Du pada Lampiran 10

Sehingga data lolos autokorelasi (terima H_0)

Hasil Pengujian Hipotesis Statistik

Tabel 9. Hasil Uji Secara Parsial

Variabel	T hitung	T tabel	Keterangan	probabilitas	A	keputusan
Inflasi	-2,025713	-1,974902	Tolak H_0	0,0449	0,05	Signifikan
GDP Perkapita	-4,825257	-1,974902	Tolak H_0	0,0000	0,05	Signifikan
UMKM	-1,051623	-1,974902	Terima H_0	0,2950	0,05	Tidak Signifikan

NPL	-2,240097	-1,974902	Tolak H0	0,0268	0,05	Signifikan
-----	-----------	-----------	----------	--------	------	------------

Uraian hasil pengujian hipotesis uji parsial (Uji t)

1. Inflasi : nilai t hitung $-2.025713 <$ nilai t tabel $-1,974902$, sehingga keputusan H0 ditolak, yang artinya terdapat pengaruh inflasi terhadap inklusi keuangan di Indonesia periode tahun 2012 sampai tahun 2016.
2. GDP Perkapita : nilai t hitung $-4.825257 <$ nilai t tabel $1,974902$, sehingga keputusan H0 ditolak, yang artinya terdapat pengaruh GDP Per Kapita terhadap inklusi keuangan di Indonesia periode tahun 2012 sampai tahun 2016.
3. UMKM : nilai t hitung $-1.051623 >$ nilai t tabel $-1,974902$, sehingga keputusan H0 diterima, yang artinya tidak terdapat pengaruh UMKM terhadap inklusi keuangan di Indonesia periode tahun 2012 sampai tahun 2016.
4. NPL : nilai t hitung $-2,240097 <$ nilai t tabel $-1,974902$, sehingga keputusan H0 ditolak, yang artinya terdapat pengaruh NPL terhadap inklusi keuangan di Indonesia periode tahun 2012 sampai tahun 2016.

Tabel 10. Hasil Uji Secara Simultan

f hitung	f tabel	Keterangan	Probabilitas	A	keputusan
154,4090	2,42781	Tolak H0	0,000000	0,05	signifikan

Berdasarkan hasil perhitungan f hitung dan t tabel dapat diketahui bahwa f hitung $>$ f tabel, yaitu $154,4090 > 2,42781$ dengan alpha sebesar 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak, atau terdapat pengaruh signifikan dari variabel inflasi, GDP Perkapita, UMKM dan NPL terhadap Inklusi Keuangan di Indonesia periode tahun 2012 sampai tahun 2016.

Tabel 11. Hasil Uji Determinasi R FEM

R- Squared	0,977491
Adjusted R-squared	0,971161

Berdasarkan hasil tabel diatas, diperoleh hasil R squared atau R2 sebesar 0,977491 atau 97 %, sehingga terdapat pengaruh variabel independen yaitu Inflasi, GDP Perkapita,

UMKM dan NPL terhadap variabel dependen yaitu Inklusi Keuangan sebesar 0,977491 atau 97% dan sisanya, 0,022509 atau 2,25 % dipengaruhi oleh variabel lain.

5. Kesimpulan Dan Saran

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan. Maka dapat disimpulkan bahwa yaitu variabel Inflasi, GDP Perkapita, UMKM dan NPL secara bersama-sama berpengaruh terhadap Inklusi Keuangan di Indonesia periode tahun 2012 sampai 2016. Dengan Provinsi yang paling berpengaruh terhadap inklusi keuangan yaitu Provinsi DKI Jakarta sebesar 0,50 terhadap inklusi keuangan. Provinsi yang terdekat dengan Provinsi DKI Jakarta, yaitu Provinsi Banten indeks inklusi keuangan sebesar 0,02. Yang artinya walaupun berdampingan dengan ibu kota negara, namun tingkat inklusi masih tergolong rendah. Sementara itu, diluar Pulau Jawa, Provinsi Bali menjadi Provinsi Kedua dengan tingkat inklusi sebesar 0,11. Dan provinsi paling ujung di Indonesia yaitu Papua tingkat inklusi sebesar 0,0005. Serta ditunjang sengan penelitian yang telah dilakukan Mbutor dan Ibrahim Uba pada tahun 2013 yang menyatakan bahwa inklusi keuangan berpengaruh terhadap peningkatan efektifitas kebijakan moneter salah satunya yaitu inflasi. Dimana, nilai inflasi yang rendah atau negatif mampu meningkatkan angka penggunaan terhadap jasa keuangan. *Determinants of Financial Inclusion in Africa: a Dynamic Panel Data Approach* oleh Evans dan Adeoye (2016) Pendapatan Perkapita secara statistik signifikan dan positif di kedua spesifikasi. Ini berarti negara dengan pendapatan per kapita yang tinggi memiliki sistem keuangan yang sangat inklusif.

Penelitian yang dilakukan oleh Hermuda Manustama (2017) menemukan hasil bahwa beberapa program keuangan inklusif yang diterapkan oleh pemerintah khususnya di Surabaya masih belum efektif. Terbukti dari beberapa UMKM yang belum maupun sudah menggunakan pinjaman modal yang menyatakan bahwa kurangnya pendekatan antar pihak Bank dengan UMKM. Sedangkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Dupas et al.. (2012) menunjukkan hasil yang berbeda bahwa peningkatan layanan jasa perbankan tidak menyebabkan peningkatan stabilitas keuangan dikarenakan tidak diikuti penurunan biaya pinjaman bagi masyarakat menengah bawah, kurangnya kepercayaan, serta tidak diikuti oleh peningkatan kualitas layanan.

Penelitian yang telah dilakukan menemukan beberapa saran yang diharapkan berguna untuk meningkatkan penelitian dan menentukan kebijakan yang ditempuh, diantaranya, penelitian dengan observasi wilayah mencakup beberapa negara perlu

dilakukan, hal tersebut sebagai bukti secara statistik mengenai tingkat pertumbuhan ekonomi, khususnya dalam indeks inklusi keuangan, sehingga negara dengan jumlah indeks inklusi keuangan yang rendah mampu menghasilkan kebijakan yang mampu meningkatkan indeks tersebut. Serta, pemerintah diharapkan mampu membangun sektor ekonomi di kalangan UMKM, karena UMKM merupakan usaha yang paling dekat dengan masyarakat berpenghasilan rendah, sesuai dengan tujuan inklusi keuangan. Namun, peningkatan dalam pembangunan UMKM perlu diiringi dengan peningkatan akses masyarakat untuk mengelola dan mendapatkan jaminan hukum atas badan usahanya, sehingga selain nilai produksi UMKM yang meningkat, data secara pasti mengenai UMKM pun terjamin.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, I., & Son, H. H. (2007). *Defining and Measuring Inclusive Growth: Application to the Philippines*.
- Astiyah, S., & Suseno. (2009). *Inflasi. Seri Kebanksentralan*.
- Bahuet, C. (2016). *Siaran Pers OJK*.
- Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., & Levine, R. (2007). Finance, inequality and the poor. *Journal of Economic Growth*, 12(1), 27–49.
- Demirgüç-kunt, A., & Klapper, L. (2014). *Measuring Financial Inclusion The Global Findex Database*.
- Dienillah, Azka Azifah and Anggraeni, L. (2016). Dampak Inklusi Keuangan Terhadap Stabilitas Sistem Keuangan di Asia. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 18.
- Gujarati, D. N., & Dawn C, P. (2010). *Basic Econometrica (fifth Edit)*. New York.
- Gujarati, Damodar N dan Dawn C. Porter. 2015. *Dasar-Dasar Ekonometrika Edisi 5 Buku 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hannig, A., & Jansen, S. (2010). *Financial Inclusion and Financial Stability: Current Policy Issues*.
- Indonesia, B. (2014). *Inklusi Keuangan*.
- Khan, S. H. R. (2011). Financial inclusion and financial stability : are they two sides of the same coin ? *Indian Bankers Association & Indian Overseas Bank, Chennai, (November)*, 1–12.
- Komisioner, D., & Jasa, O. (2017). *Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia*.
- Madira, S. (2012). *Index Of Financial Inclusion-A Measure Of Financial Sector Inclusiveness*. Berlin Working Papers On Money, Finance, Trade and Development, 7.
- Mankiw, N. G. (2008). *Pengantar Ekonomi Makro (volume 2)*. Jakarta.
- Manustama, H. (2017). Efektifitas Keuangan Inklusif Terhadap Perkembangan UMKM di Surabaya : Pendekatan Fenomenologi. *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas*, 14.
- Mbutor O and Ibrahim A Uba. (2013). The Impact Of Financial Inclusion On Monetary Policy In Nigeria. *Journal Of Economic and International Finance*.
- Morgan, P. J. (2014). *Asian Development Bank Institute, (488)*.
- Mudrajad, K. (2007). *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.

Nugroho, A. (2017). Analisis determinan inklusi keuangan di Indonesia.

Nursechafia, & Made Sanjaya, I. (2016). Financial Inclusion And Inclusive Growth : A Cross-Province
Financial Inclusion And Inclusive Growth : Bulletin Of Monetary, 18(February), 2–27.

Sarma, M., & Pais, J. (n.d.). Financial Inclusion and Development : A Cross Country, (4), 1–30.

Sarma, M. (2012). Index of Financial Inclusion – A measure of financial sector inclusiveness.

Ummah, Bintang Badriatul. 2013. Analisis Keterkaitan Inklusi Keuangan Dengan Pembangunan di
ASIA. [Skripsi]. Bogor. Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor

Widarjono, A. (2013). Ekonometrika: Pengantar dan Aplikasinya. Jakarta: Ekonosia.

Zouari-ghorbel, S. (2014). Macroeconomic and Bank-Specific Determinants of Household ' s Non-
Performing Loans in Tunisia : a Dynamic Panel Data. Procedia Economics and Finance,
13(December 2013), 58–68.

<https://www.bi.go.id/id/perbankan/keuanganinklusif/program>

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik>

<https://www.bps.go.id>